



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Universitas di Indonesia: Apakah Sudah Siap Untuk Menyusun Laporan Keberlanjutan?

Asniati Bahari^{1*}, Dwivana Asri Chasvella² dan Sanda Patrisia Komalasari³

¹Universitas Andalas, Departemen Akuntansi, email: asniati@eb.unand.ac.id

²Universitas Andalas, Departemen Akuntansi, email: dwivanachasvella@gmail.com

³ Universitas Andalas, Departemen Akuntansi, email: sandapatrisia@eb.unand.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Universitas di Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada setiap unsurnya terdapat banyak kegiatan yang mendukung pengembangan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan perguruan tinggi di Indonesia dalam melaporkan aktivitas keberlanjutannya. Variabel dalam penelitian ini adalah standar pelaporan aktivitas keberlanjutan, yakni standar GRI 2016 yang terdiri dari standar universal, ekonomi, lingkungan, dan standar sosial. Sampel penelitian adalah 35 universitas terbaik menurut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2019. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yakni semua informasi relevan yang dipublikasikan pada website universitas. Analisis dilakukan dengan melihat persentase kesesuaian konten yang disajikan oleh universitas dalam websitenya dengan informasi yang seharusnya diungkapkan menurut standar GRI. Penelitian ini menemukan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dikategorikan kurang siap dalam mengungkapkan indikator standar universal. Pengungkapan aktivitas dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial, Universitas di Indonesia malah sangat kurang dan dapat dinyatakan tidak siap. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang pelaporan keberlanjutan dan juga manajemen lingkungan pada Universitas di Indonesia. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan oleh manajemen Universitas dan juga Kementerian Pendidikan Indonesia, agar ke depannya dapat menyusun panduan bagi Perguruan Tinggi dalam menyusun laporan keberlanjutannya.

Kata kunci: Pelaporan Keberlanjutan, GRI (Global Reporting Initiative), Pendidikan Tinggi

Abstract

Universities in Indonesia have a duty to implement the „Tri Dharma Perguruan Tinggi“. In each of its element, there are many activities that support sustainable development. This study aims to analyze the level of readiness of universities in Indonesia in reporting their sustainable activities. The variable in this study is the sustainability activity reporting standard, the 2016 GRI standard which consists of universal, economic, environmental, and social standards. The research sample was the 35 best universities according to the Ministry of Research, Technology and Higher Education in 2019. The data in this study were secondary data which were all relevant information published on the university website. The analysis was carried out by looking at the percentage of conformity of the content presented by the university on its website with information that should be disclosed according to GRI standards. This study found that universities in Indonesia were categorized as less ready to disclose universal standard indicators. Meanwhile,

disclosure of activities in the economic, environmental, and social fields, universities in Indonesia is even less and can be declared unprepared. The results of this study can enrich knowledge about sustainability reporting and environmental management at universities in Indonesia. The findings of this study can also be used by University management and also the Indonesian Ministry of Education, so that in the future they can develop guidelines for universities in preparing their sustainability reports.

Keywords: Sustainability Reporting, GRI (Global Reporting Initiative), Higher Education

1. Pendahuluan

Menuju Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk tahun 2030, yang merupakan komitmen nasional dan internasional untuk mengatasi tantangan sosial seperti kemiskinan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan krisis kesehatan. Semua perusahaan atau badan dari berbagai ukuran dan sektor dipanggil untuk memainkan peran kunci dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan ini [1]. Pada saat ini, semakin banyak organisasi yang memasukkan pola pikir keberlanjutan dalam tata kelola, model bisnis, dan strategi mereka [2]. Sejumlah insentif memotivasi organisasi untuk memberlakukan praktik keberlanjutan dengan cara yang lebih holistik dan terintegrasi. Di samping itu, pembangunan berkelanjutan meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan daya tarik perusahaan, mendukung pengurangan risiko dan meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan [3].

Pelaporan perusahaan semakin diperlukan tidak hanya untuk mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungan tetapi juga untuk mengomunikasikan bagaimana keberlanjutan tertanam dalam visi dan tata kelola perusahaan, menginformasikan strategi bisnis dan menopang kinerja keuangan [2]. Pelaporan keberlanjutan atau *sustainability report* perusahaan adalah alat yang ampuh untuk menjelaskan mengenai pembangunan keberlanjutan perusahaan ataupun badan [4].

Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keberlanjutan semakin dibutuhkan bagi banyak pemangku kepentingan, khususnya pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham dan masyarakat. Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosialnya. Informasi tersebut bersifat transparan dan akuntabel [5]. Isu terkait laporan keberlanjutan juga telah mengarah kepada pelaporan berkelanjutan yang disediakan oleh perguruan tinggi. Penyebab hal ini adalah karena pendidikan memiliki peran sangat penting dalam memungkinkan sebuah organisasi mencapai pembangunan berkelanjutan [6].

Pada dasarnya, perguruan tinggi mempunyai kepentingan yang sama dengan perusahaan, yakni berusaha untuk terus beroperasi (*survive*), terus dikenal oleh setiap masyarakat, dan terus memiliki daya jual atau daya saing [7]. Lembaga perguruan tinggi seluruh dunia bersiap untuk mempraktikkan keberlanjutan secara efisien agar dapat dihasilkan pembelajaran yang bermanfaat dan berkontribusi yang bersifat lokal dan regional sebagai tujuan dilakukannya keberlanjutan [8]. Laporan keberlanjutan diperlukan untuk mewakili bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi pada pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat perguruan tinggi itu beroperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesiapan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam menyusun laporan berkelanjutan yang sesuai Standar GRI.

2. Tinjauan Pustaka

Teori *stakeholder* merupakan sebuah teori yang menyebutkan bahwa dalam beroperasi, entitas tidak hanya mementingkan kepentingan entitasnya sendiri, melainkan ia juga harus bermanfaat bagi pemangku kepentingannya. Teori pemangku kepentingan menyebutkan bahwa kepentingan perorangan maupun kelompok sangat mempengaruhi suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas [10]. Berdasarkan asumsi tersebut, para pemangku kepentingan mempunyai peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dimana entitas berdiri. Salah satu wujud teori ini adalah dengan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan perusahaan yang disebut *sustainability report*.

Di sisi lain, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan perlu memastikan agar kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga seluruh aktivitasnya dapat diterima oleh pihak luar sebagai suatu hal yang sah untuk dilakukan [11]. Tambahan lagi, perusahaan ikut serta dalam memberikan kontribusi terkait hal-hal yang berhubungan dengan etika bisnis, perhatian terhadap pengembangan kinerja karyawan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan perusahaan guna meningkatkan legitimasinya [12]. Berdasarkan teori legitimasi tersebut, segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari adanya kesesuaian nilai antara perusahaan itu sendiri dengan nilai sosial yang ada pada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan legitimasinya adalah dengan mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat.

2.1 Sustainability Reporting

Global Reporting Initiative (GRI) memperkenalkan *Sustainability report* pertama kali di tahun 1997. *Sustainability report* atau laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabel dari kinerja suatu badan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Laporan tersebut akan disampaikan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal suatu badan tersebut [13].

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang diterbitkan untuk mengungkapkan kinerja terkait keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai upaya menuju pembangunan berkelanjutan. *Sustainability report* tidak hanya menyediakan informasi kinerja keuangan melainkan juga non keuangan. Informasi non keuangan tersebut terdiri atas informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan entitas dapat bertumbuh secara berkelanjutan (*sustainable performance*) [14]. Informasi diungkapkan secara transparan mengenai komitmen dan kinerja perusahaan. Melalui pelaporan tersebut pemangku kepentingan akan memperoleh gambaran mengenai kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan perusahaan.

2.2 GRI Standards

GRI Standard adalah petunjuk yang digunakan untuk menyusun *sustainability report*. Standar GRI ini diperkenalkan pada 8 Juni 2017 oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar GRI ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018. Standar GRI menyediakan menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global dalam mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan. Standar ini akan mendorong tingkat transparansi dan konsistensi dalam pembuatan informasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat berguna dan terpercaya.

Standar GRI menyediakan prinsip-prinsip pelaporan, pengungkapan standar, dan panduan penerapan dalam penyusunan laporan berkelanjutan. Pedoman tersebut menyediakan referensi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan tata kelola dan kinerja dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi organisasi. Terdapat dua jenis pengungkapan dalam *GRI Standards* [4], yakni Pengungkapan Standar Universal (Seri 100) dan Pengungkapan Topik Spesifik: Standar Ekonomi (Seri 200); Standar Lingkungan (Seri 300); dan Standar Sosial (Seri 400).

2.3 Laporan Keberlanjutan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan generasi yang memiliki kapabilitas baik akademis maupun non akademis (UU No. 2 Tahun 1989 pasal 16 ayat 1). Perguruan Tinggi diharapkan mampu mengimplementasikan, mengembangkan, dan mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan entitas nirlaba yang tidak terlepas dari persaingan untuk menjamin keberlangsungannya [9]. Dengan kata lain, perguruan tinggi diartikan sebagai entitas yang tidak memperoleh keuntungan dalam kegiatan operasionalnya. Padahal perguruan tinggi merupakan entitas yang memperoleh keuntungan, tetapi keuntungannya digunakan untuk membangun entitas tersebut, bukan untuk pemilik atau pendiri entitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memfokuskan diri pada kemampuan akademik saja, tetapi diharapkan dengan kemampuan tersebut mereka dapat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

Upaya perguruan tinggi di Asia-Pasifik dalam mengintegrasikan fungsinya merangkul penjangkauan masyarakat dan memanfaatkan dukungan pemerintah telah menghasilkan kemajuan global yang menggembirakan [8]. Inovasi keberlanjutan pada perguruan tinggi di Asia Pasifik memberikan indikator potensi masa depan yang penting dan bermanfaat. Implementasi *sustainability report* pada perguruan tinggi dapat menjamin kontribusi global terkait pembangunan keberlanjutan [15]. Di samping itu, prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab perguruan tinggi terhadap pembangunan keberlanjutan, diantaranya peningkatan manajemen, keberadaan kantor keberlanjutan, kegiatan operasional terkait penggunaan sumber daya, publikasi tahunan laporan keberlanjutan, jaringan kolaboratif Internasional, serta keterlibatan para pemangku kepentingan. [16]. Prinsip-prinsip untuk mengimplementasikan strategi keberlanjutan tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya perguruan tinggi di seluruh dunia dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian mengenai laporan keberlanjutan pada perguruan tinggi di Indonesia masih sangat terbatas. Diantaranya adalah [7], dimana penelitian tersebut bertujuan untuk menggali kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan sehingga dapat disusun laporan tahunan yang memuat informasi yang dibutuhkan tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laporan tahunan yang disusun oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia masih didominasi dengan pelaporan yang bersifat kinerja ekonomi. Sedangkan laporan mengenai kinerja operasionalnya dilaporkan secara terpisah dan tidak diunggah pada *website*. Tingkat kesiapan antara PTN dan PTS di Indonesia dalam melakukan pelaporan berkelanjutan sesuai dengan standar yang

diterapkan oleh GRI G4 [9]. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PTN lebih siap dalam menyusun laporan keberlanjutannya dibandingkan PTS.

Dari beberapa penelitian yang telah dicantumkan diatas, dapat dilihat bahwasanya masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses analisis yang dilakukan terkait pengungkapan laporan keberlanjutan pada perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan perguruan tinggi di Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai standar GRI yang berlaku saat ini, yakni *GRI Standards*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan objek penelitian 35 *website* resmi Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia yang diambil melalui *website* resmi Ristek Dikti tahun 2019. Ristek Dikti mengurutkan klasterisasi 100 perguruan tinggi terbaik berdasarkan penilaian pada kinerja input, proses belajar mengajar, dan *outcome* yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi pada tahun 2019 [17]. Dalam penelitian ini, terdapat 4 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan Perguruan Tinggi di Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai *GRI Standards*, yakni standar universal, ekonomi, lingkungan, dan social dengan 147 item. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kata kunci untuk setiap item dari *website* resmi Universitas. Seandainya ditemukan, diberi nilai 1 (satu), kalau tidak ditemukan, diberi nilai 0 (nol).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Dengan metode ini, peneliti memberikan pembobotan (*scoring*) untuk mengukur tingkat kesiapan Perguruan Tinggi dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai *GRI Standards*. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan tingkat kesiapan yaitu kondisi dimana perguruan tinggi telah bersedia, mampu, dan siap untuk memberikan respon dan jawaban terhadap tugas yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan global yang sedang dihadapi saat ini. Tingkat kesiapan ini dilihat berdasarkan kemampuan perguruan tinggi dalam menyediakan informasi yang sesuai dengan indikator pada laporan keberlanjutan. Semakin besar kesesuaian informasi yang disediakan perguruan tinggi dengan indikator pada GRI, dapat mencerminkan kesiapannya dalam menyusun laporan keberlanjutan. Tabel 1 menunjukkan skor yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan Universitas di dalam menyiapkan laporan keberlanjutannya.

Tabel 1: Skor dan penilaian tingkat kesiapan pelaporan Keberlanjutan

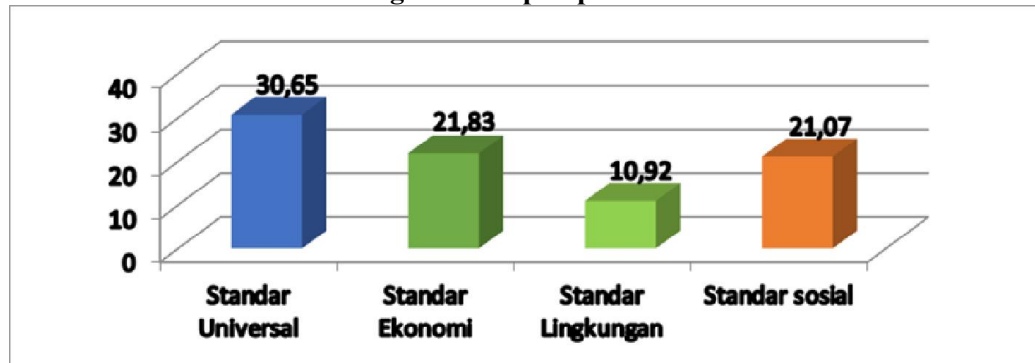
| <i>Score (%)</i> | Penilaian |
|------------------|------------------------------|
| 0-25 | Perguruan tinggi tidak siap |
| 26-50 | Perguruan tinggi kurang siap |
| 51-75 | Perguruan tinggi cukup siap |
| 76-100 | Perguruan tinggi siap |

Sumber: [18]

4. Hasil Penelitian dan Diskusi

Setelah dilakukan perbandingan antara informasi dan konten yang ada pada *website* perguruan tinggi dengan item dalam setiap indikator *GRI Standards*, diperoleh hasil seperti terlihat pada grafik 1.

Grafik 1: Tingkat Kesiapan per Variabel



Sumber: Data diolah sendiri.

Grafik 1 memperlihatkan bahwa kesiapan Perguruan Tinggi di Indonesia sangat rendah. Untuk indikator universal, hanya mencapai 30,65%, dimana ini dikategorikan pada kurang siap. Sementara indikator lainnya, memiliki skor yang kurang dari 25%. Ini dapat dikategorikan tidak siap. Variabel pengungkapan standar universal terdiri dari 3 indikator, yaitu landasan, pengungkapan umum, dan pendekatan manajemen. Tabel 1 memperlihatkan tingkat kesiapan Perguruan Tinggi di Indonesia dari segi standar universal.

Tabel 2: Tingkat Kesiapan per Indikator dalam Variabel Standar Universal

| Indikator | Rata-Rata(%) |
|----------------------|--------------|
| Landasan | 0 |
| Pengungkapan Umum | 37,96 |
| Pendekatan Manajemen | 54 |
| Total | 91,96 |
| Rata-Rata | 30,65 |

Sumber: Data diolah sendiri.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa rata-rata kesiapan dalam variabel pengungkapan standar universal sebesar 30,65%. Ini berarti perguruan tinggi di Indonesia dari segi standar universal kurang siap dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai standar GRI. Item dalam indikator yang paling banyak diungkapkan adalah pada indikator pendekatan manajemen yaitu sebesar 54%. Sedangkan untuk pengungkapan indikator landasan adalah 0%.

Standar kedua, adalah pengungkapan standar ekonomi terdiri dari 6 indikator, yaitu kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti-korupsi, dan perilaku anti-persaingan. Tingkat kesiapan dari segi standar ekonomi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Tingkat Kesiapan per Indikator dalam Variabel Standar Ekonomi

| Indikator | Rata-Rata(%) |
|------------------|--------------|
| Kinerja Ekonomi | 48,62 |
| Keberadaan Pasar | 4,41 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Dampak Ekonomi Tidak Langsung | 51,47 |
| Praktik Pengadaan | 0 |
| Anti-korupsi | 26,47 |
| Perilaku anti-persaingan | 0 |
| Total | 130,97 |
| Rata-Rata | 21,83 |

Sumber: Data diolah sendiri.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa rata-rata persentase standar ekonomi hanya mencapai 21,83%. Ini berarti bahwa dari segi ekonomi, perguruan tinggi di Indonesia tidak siap dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai standar GRI. Item yang paling banyak diungkapkan adalah pada indikator dampak ekonomi tidak langsung sebesar 51,47% kemudian dilanjutkan oleh indikator kinerja ekonomi 48,62%. Sedangkan untuk pengungkapan untuk indikator praktik pengadaan dan perilaku anti-persaingan adalah 0%.

Standar ketiga, adalah pengungkapan standar lingkungan terdiri dari 8 indikator seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4: Tingkat Kesiapan per Indikator dalam Variabel Standar Lingkungan

| Indikator | Rata-Rata (%) |
|------------------------------|---------------|
| Material | 19,67 |
| Energi | 29 |
| Air | 9 |
| Keanekaragaman Hayati | 6,75 |
| Emisi | 8,86 |
| Air Limbah dan Limbah | 6,6 |
| Kepatuhan Lingkungan | 6 |
| Penilaian Lingkungan Pemasok | 1,5 |
| Total | 87,38 |
| Rata-Rata | 10,92 |

Sumber: Data diolah sendiri.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengungkapan standar lingkungan dalam *website* perguruan tinggi Indonesia yang diteliti hanya mencapai angka 10,92%. Ini berarti bahwa dari segi standar lingkungan, perguruan tinggi di Indonesia tidak siap dalam menyusun laporan keberlanjutannya. Indikator yang paling banyak diungkapkan adalah indikator energi yaitu sebesar 29%. Sedangkan indikator yang paling sedikit diungkapkan adalah indikator penilaian lingkungan pemasok yaitu hanya sebesar 1,5%.

Standar keempat, merupakan pengungkapan standar sosial terdiri dari 19 indikator. Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase yang diperoleh pada tingkat kesiapan dari segi standar sosial yaitu sebesar 21,07%. Ini berarti dari segi standar sosial perguruan tinggi tidak siap dalam menyusun laporan keberlanjutannya. Indikator yang paling banyak ditemukan dalam *website* perguruan tinggi adalah indikator hubungan tenaga kerja atau manajemen yaitu sebesar 88%. Sementara itu, ada 7 indikator yang sama sekali tidak termuat di dalam *website* perguruan

tinggi yaitu indikator non-diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa atau wajib kerja, hak-hak masyarakat adat, penilaian sosial pemasok, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi.

Tabel 5: Tingkat Kesiapan per Indikator dalam Variabel Standar Sosial

| Indikator | Rata-Rata(%) |
|---|--------------|
| Kepegawaian | 47,67 |
| Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen | 88 |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2,25 |
| Pelatihan dan Pendidikan | 32,33 |
| Keanekaragaman dan Kesempatan Setara | 45,5 |
| Non-diskriminasi | 0 |
| Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif | 3 |
| Pekerja Anak | 0 |
| Kerja Paksa atau Wajib Kerja | 0 |
| Praktik Keamanan | 53 |
| Hak-Hak Masyarakat Adat | 0 |
| Penilaian Hak Asasi Manusia | 9 |
| Masyarakat Lokal | 47 |
| Penilaian Sosial Pemasok | 0 |
| Kebijakan Publik | 59 |
| Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan | 10,5 |
| Pemasaran dan Pelabelan | 3 |
| Privasi Pelanggan | 0 |
| Kepatuhan Sosial Ekonomi | 0 |
| Total | 400,25 |
| Rata-Rata | 21,07 |

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa secara umum perguruan tinggi di Indonesia tidak siap dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai *GRI Standards*. Hampir tidak ada perguruan tinggi di Indonesia yang mencoba untuk menerbitkan laporan keberlanjutannya, walaupun ada, tidak ditemukan item-item yang relevan dengan indikator ini yaitu prinsip pelaporan, proses pelaporan, dan klaim terhadap penggunaan standar GRI. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya [7]. Hal ini disebabkan karena laporan tahunan yang disusun oleh sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia masih didominasi dengan pelaporan yang bersifat keuangan. Sedangkan laporan mengenai kinerja operasionalnya dilaporkan secara terpisah dan tidak diunggah pada *website*.

Hasil penelitian ini menemukan seluruh website perguruan tinggi sudah mengungkapkan hal yang berkaitan dengan investasi infrastruktur dan dukungan layanan yang diberikannya untuk menunjang proses operasinya. Namun rata-rata perguruan tinggi tidak transparan mempublikasikan laporan pengeluaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan barang ataupun jasanya. Laporan yang dihasilkan di dalam informasi publik yang disediakan pada

website perguruan tinggi masih beragam. Ada yang melaporkan dalam bentuk laporan tahunan, laporan keuangan, laporan kinerja rektor, laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan masih banyak perguruan tinggi yang tidak menyediakan laporan sama sekali sehingga terdapat perbedaan dalam penyajian informasi antar perguruan tinggi yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan secara keseluruhan tingkat kesiapan 35 perguruan tinggi terbaik versi Ristek Dikti tahun 2019 dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai *GRI Standards*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan, perguruan tinggi di Indonesia tidak siap dalam menyusun laporan keberlanjutannya.

Hasil penelitian ini menambah hasil konfirmasi kelangkaan transparansi pelaporan berkelanjutan [19], [20], [21]. Penelitian mereka menyoroti perlunya pendekatan praktis untuk memandu perusahaan atau instansi menuju transparansi dalam pelaporan berkelanjutan, sehingga perusahaan ataupun instansi perguruan tinggi dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan yang diagendakan oleh PBB untuk tahun 2030. Sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok keanggotaan PBB, Indonesia hendaknya juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di perguruan tinggi. Dengan adanya laporan keberlanjutan pada perguruan tinggi dapat meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan mekanisme dan saluran komunikasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemantauan pelaporan [15]. Masalah pelaporan berkelanjutan merupakan masalah akuntansi yang akan menjadi tantangan organisasi dan profesional akuntan [2]. Hal ini disebabkan karena ia beranggapan bahwa studi ini berkaitan dengan evolusi pelaporan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi profesional akuntan untuk terus berkembang dengan mau menambah pengetahuan dan keterampilannya, terutama dalam bidang pelaporan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa informasi yang tersedia dalam 35 *website* perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Ristek Dikti tahun 2019. Analisis tingkat kesiapan perguruan tinggi di Indonesia dalam melaporkan laporan berkelanjutan yang sesuai dengan standar GRI merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan perguruan tinggi di Indonesia tidak siap dalam menyusun laporan berkelanjutan, kecuali untuk standar universal. Kesiapan dalam memenuhi standar universal sudah lebih maju, walau masih kurang siap. Penyebab hal ini terjadi adalah karena laporan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi belum terkumpul dalam satu sarana yang terpublikasi. Belum adanya standar penyusunan laporan keberlanjutan untuk perguruan tinggi di Indonesia juga menjadi penyebab tidak siapnya perguruan tinggi dalam melaporkan laporan keberlanjutannya. Hal ini dapat dilihat dari masih beragamnya informasi yang tersedia pada *website* perguruan tinggi.

Hasil penelitian ini menambah konfirmasi kelangkaan transparansi pelaporan berkelanjutan pada Perguruan Tinggi. Walaupun tidak ada regulasi khusus yang mewajibkan perguruan tinggi untuk melaporkan laporan keberlanjutannya, mereka tetap perlu mempersiapkan diri untuk dapat menyusun laporan keberlanjutan. Hal ini dilakukan agar mereka mampu menghadapi tantangan dunia. Oleh sebab itu, pendekatan praktis untuk memandu perguruan tinggi menuju transparansi dalam pelaporan berkelanjutan sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- [1] Rashed, A. H., & Shah, A. (2020). *The role of private sector in the implementation of sustainable development goals*. Environment, Development and Sustainability.
- [2] Lai, A., & Stacchezzini, R. (2021). *Organisational and professional challenges amid the evolution of sustainability reporting: a theoretical framework and an agenda for future research*. Meditari Accountancy Research
- [3] Boar, A., Bastida, R., & Marimon, F. (2020). *A systematic literature review. Relationships between the sharing economy, sustainability and sustainable development goals*. Sustainability.

- [4] Global Reporting Initiative. *GRI Standards Download Center*. Diunduh 04 Desember 2019 dari Global Reporting Initiative: <https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/>.
- [5] Anggraini, F. Retno. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- [6] Vagnoni, E. dan Cavicchi, C. 2015. *Anexploratory Study of Sustainable Development at Italian Universities*. Vol 16 No.2, hal 217–216.
- [7] Rofelawaty, B. dan Ridhawati, R. 2016. *Analisis Kemungkinan Penerapan Laporan Berkelanjutan sebagai Laporan Tahunan pada Perguruan Tinggi*. DINAMIKA EKONOMI Jurnal Eonomi dan Bisnis, Vol.9 No.2.
- [8] Ryan, A., Tilbury, D., Corcoran, P.B., Abe, O., dan Nomura, K. 2010. *Sustainability in higher education in the Asia-Pacific: developments, challenges, and prospects*. International Journal of Sustainability in Higher Education.
- [9] Mutia, Galuh R. 2017. *Analisis Kesiapan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) pada Perguruan Tinggi di Indonesia*. Yogyakarta.
- [10] Huang, A. C., dan Kung, F. 2017. *Drivers of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation : Evidence from Taiwan*. Journal of Etika Bisnis, Vol 96 No.3, hal 435-451.
- [11] Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Book Company. Sydney.
- [12] Fashikhah, I., Rahmawati, E., dan Sofyani, H. 2018. *Determinan Environmental Disclosure Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.7 No.1, hal 31-35.
- [13] Lesmana, Yuliani dan Tarigan, Josua. 2014. *Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik dari Sisi Asset Management Ratios*. Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra.
- [14] Elkington, J. 1997. *Cannibal with Foks*. Oxford : Capstone Publishing.
- [15] Yanez, S., Uruburu, A., Moreno, A., dan Lumbreras, J. 2018. *The Sustainability Report as an Essential Tool for The Holistic and Strategic Vision of Higher Education Institutions*. Journal of Cleaner Production.
- [16] Ramisio, Paulo J., Pinto, Ligia M. C., Gouveia, N., Costa, H., dan Arezes, D. 2019. *Sustainability Strategy in Higher Education Institutions: Lessons learned from a nine-year case study*. Journal of Cleaner Production, hal 300-309.
- [17] Kementrian Riset dan Teknologi. 2019. *Klasterisasi Perguruan Tinggi Terbaik Indonesia tahun 2019*. Diakses pada 23 November 2019 melalui <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/>
- [18] Alisha Rahmadhani. 2018. *Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Se-Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi, Vol.6 No.3 Seri C.
- [19] Lopez, B. (2020). *Connecting business and sustainable development goals in Spain*. Marketing Intelligence & Planning.
- [20] Sardianou, E., Staupoulou, A., Evangelinos, K., & Nikolaou, I. (2021). *A materiality analysis framework to assess sustainable development goals of banking sector through sustainability reports*. Sustainable Production and Consumption.
- [21] Costa, R., Menichini, T., & Salierno, G. (2022). *Do SDGs Really Matter for Business? Using GRI Sustainability Reporting to Answer the Question*. European Journal of Sustainable Development.